



Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi

Akhmad Faozan^{)}*

*) Penulis adalah Sarjana Hukum Islam (Lc.) jurusan Syari'ah Islamiah di Universitas al-Azhar, Kairo, dan Magister Agama (M.Ag.) bidang Hukum Islam pada konsentrasi Muamalat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang ia sebagai calon dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Abstract: Since the failure of our economy system in which provitable for some competable group, therefore Indonesian economy is expected to be carried out by some competence public institutions that have been historically survived. These institutions are based on public and middle class industry such as survived home industry, Islamic boarding schools, in fact, are potential institutions to grow up into a kind of public economy. Therefore it needs accurate analyzing of carry out the economy empowering. The last target of economic empowering of Islamic boarding schools is their own independence. As the time goes by, Islamic boarding schools are always labelled as aid proposal agent. They would be relieved from that problem while their economic condition is getting stronger. **Keywords:** *Islamic boarding, empowering, economy, and independence.*

Pendahuluan

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Kata pesantren berasal dari kata "santri", yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an* menjadi pesantrian (pesantren) berarti tempat tinggal para santri, sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama Islam. Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut dengan Pondok. Sementara itu, di Aceh corak pendidikan seperti itu disebut dengan *meunasah*, dan di Sumatera Barat disebut dengan *surau*.¹

Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri Ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan Ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda, yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.²

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini, Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, Ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu



lebih Ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara profesional.³

Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*). Ponpes juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*) di tengah perubahan yang terjadi.⁴

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, Ponpes memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki Ponpes tersebut terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.⁵

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Sebagaimana diketahui bahwa kegagalan sistem perekonomian Indonesia ialah adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi. Sistem ekonomi berbasis konglomerasi ini kenyatannya hanya menguntungkan orang atau kelompok yang telah memiliki kemampuan dan akses ekonomi sehingga hanya merekalah yang untung. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan akses, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan usahanya.⁶

Setelah kegagalan sistem ekonomi konglomerasi, maka harapan ekonomi itu ditumpahkan ke lembaga-lembaga rakyat yang sudah teruji dan lulus dalam sejarah kehidupan masyarakat dan berbangsa. Ternyata, yang justru tahan di tengah badai krisis ekonomi adalah lembaga-lembaga ekonomi mikro yang berbasis rakyat. Industri kelas menengah kecil seperti *home industri* justru memiliki daya ketika berhadapan dengan krisis ekonomi.

Ponpes, kenyatannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat, sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika Ponpes hanya menjadi penonton di era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain boleh jadi bergerak ke arah kemajuan. Oleh karena itu, kiranya diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.⁷



Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi Ponpes adalah kemandirian pesantren. Selama ini Ponpes selalu dilabeli dengan nama lembaga pengedar proposal dana bantuan, baik pada institusi formal atau non formal. *Labelling* itu tentunya tidak mengenakkan. Ponpes akan terbebas dari anggapan itu kalau Ponpes menjadi lembaga yang kuat, terutama dalam sektor ekonomi. Dengan sendirinya, tidak setiap ada kegiatan, apakah membangun gedung atau kegiatan lain, tidak selalu sibuk mengedarkan proposal kesana-kemari.⁸

Kendala-Kendala dalam Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Pesantren

Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Jusuf Irianto sebagaimana dikutip oleh Rr. Suhartini, masalah kualitas SDM sebetulnya bukan hanya masalah Ponpes saja, tetapi dalam skala yang lebih luas, yakni masyarakat Indonesia secara umum. Data tentang *Human Development Index (HDI)* yang disajikan *United Nations for Development Program (UNDP)* menunjukkan bahwa peringkat kualitas SDM di Indonesia tahun 2000 berada pada urutan 109. Peringkat Indonesia itu hanya satu tingkat lebih tinggi dari Vietnam yang menempati urutan 110, namun sangat jauh berbeda dengan sesama negara anggota ASEAN lainnya. HDI Singapura berada di urutan 22, Brunai Darussalam berada di urutan 25, Malaysia berada di urutan 56, serta Thailand dan Philipina berada di urutan 67 dan 77.⁹

Sementara itu, pada tahun 2000, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, sekitar 38,5 juta jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,1 juta jiwa bila dibanding tahun 1999. Salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah pengangguran tersebut adalah terbatasnya kemampuan sektor riil dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang semakin membesar.¹⁰

Bagaimana dengan SDM Ponpes? Tanpa bermaksud intervensi terhadap eksistensi Ponpes, secara objektif harus diakui bahwa angka 38,5 juta jiwa pengangguran tersebut, sebagian di antaranya adalah komunitas alumni Ponpes. Kondisi ini sudah barang tentu bukan semata kesalahan para santri, tetapi akan lebih baik bila dilihatnya secara komprehensif, yakni dengan melihat bagaimana SDM pengelola lembaga-lembaga Pendidikan yang ada di Pesantren.

SDM di sini tentu saja tidak hanya meliputi kemampuan dasar akademis, tetapi juga kemampuan skill individual-kolektif. Perpaduan antar-kemampuan akademis dan *skill* individual-kolektif inilah yang pada saatnya sangat menentukan terhadap kualitas suatu produk. Dengan kata lain, pesantren sebagai sebuah *center of excellence*, seharusnya melengkapi kurikulum dan metodologinya, tidak hanya pada satu kemampuan, yaitu mencetak pemikir-pemikir agama, tetapi sekaligus praktisi-praktisi sosial dengan basis agama. Untuk keperluan inilah berbagai ilmu dan kemampuan terapan sangat dibutuhkan.



Menurut Toto Tasmara ada beberapa nilai yang selama ini menjadi penghambat etos kerja bagi orang Islam, di antaranya adalah:¹¹

- 1) *Khurofat* dan takhayul;
- 2) Tak akan lari gunung dikejar, *alon-alon asal kelakon*;
- 3) Gampangan, *take it easy*, bagaimana nanti sajalah;
- 4) *Mangan ora mangan pokoke kumpul*;
- 5) *Nrimo*-fatalistis;
- 6) Kerja kasar itu hina;
- 7) *Jimat* atau *mascot*.

Kelembagaan

Secara garis besar, model kelembagaan Ponpes dapat dikategorikan ke dalam dua kategori,¹² sebagai berikut.

1). Integrated Structural

Maksudnya adalah semua unit atau bidang yang ada dalam Ponpes merupakan bagian tak terpisahkan dengan Ponpes. Artinya, semua unit atau bidang dengan berbagai ragam spesifikasi, berada dalam suatu struktur organisasi. Model seperti ini, sebenarnya tidak terlalu bermasalah seandainya masing-masing unit atau bidang memiliki *job discription* yang jelas, termasuk hak dan kewenangannya. Sebaliknya, Apabila hal ini tidak dijumpai sementara kendali organisasi berpusat hanya pada satu orang (dan inilah yang banyak terjadi di Ponpes), maka dapat dipastikan bahwa sistem keorganisasian dan kelembagaan tidak bisa berjalan dengan baik. Istilah yang sering kita dengar “semuanya harus mendapat restu sang Kiai”. Inilah problem klasik kelembagaan yang biasanya banyak dijumpai di Ponpes. Meski demikian, Apabila figur Kiai yang demokratis, maka otoritarianisme kelembagaan dapat dihindarkan.

2). Integrated Non-Structural

Maksudnya adalah unit atau bidang usaha yang dikembangkan Ponpes terpisah secara struktural organisatoris. Artinya, setiap bidang usaha mempunyai struktur tersendiri yang independen. Meski demikian, secara emosional dan ideologis tetap menyatu dengan Ponpes. Pemisahan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian lembaga, baik dalam pengelolaan atau pengembangannya. Adapun kontribusi yang diberikan pada Ponpes, biasanya berupa semacam manajemen *fee*. Model kelembagaan seperti ini biasanya mengadopsi sistem manajemen modern. Karenanya, tolok-ukurnya adalah profesionalisme.

Terobosan/Inovasi dan Net-Working

Problem ketiga yang dirasa mendasar adalah kurangnya keberanian Ponpes untuk melakukan terobosan keluar, atau membuat jaringan, baik antarPonpes maupun Ponpes dengan institusi lain.



Kurangnya keberanian ini tidak terlepas dari dua problem yang ada, yaitu SDM dan kelembagaan, akibat lebih jauh, Ponpes tidak atau kurang maksimal memfungsikan dirinya sebagai *agent of development*. Agar dapat menjadi agen perubahan dan pemberdayaan, ada beberapa yang harus dipenuhi, antara lain: wawasan, komunikasi, kekuasaan atau kekuatan, politik, dan modalitas ekonomi.¹³

Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Pesantren

Menurut Yusuf Qardhawi, banyak orang memiliki persepsi yang salah terhadap Islam dalam masalah ekonomi. Menurut mereka Islam sama sekali tidak memperhatikan masalah ekonomi, agama dan ekonomi adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Anggapan yang demikian sangatlah keliru karena Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi.¹⁴ Baik al-Qur'an maupun Hadis sangat menganjurkan umat Islam supaya tidak meninggalkan dunia atau masalah ekonomi. Al-Qur'an menganggap harta sebagai penopang kehidupan¹⁵ dan kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.¹⁶ Nabi sendiri juga sangat menghawatirkan kemiskinan dan menganjurkan umat Islam supaya bersungguh-sungguh mencari rizki. Kondisi kemiskinan menurut beliau bisa mempengaruhi keimanan seseorang (*kadal faqru an yakuna kufron*).

Pesantren sebagai sebuah "institusi budaya" yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren memosisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini unsur-unsur yang diberdayakan di dalam lingkungan Ponpes.

Kiai-Ulama

Kiai-ulama adalah figur yang merupakan elemen paling esensial dalam pesantren. Kiai-ulama adalah orang yang memimpin pesantren dengan kharisma tinggi, ibadah yang tekun serta pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam. Oleh sebab itu, para Kiai-ulama, di samping memberikan pelajaran agama dan menjadi pemimpin spiritual para santrinya, tidak jarang juga menjadi "dokter-dokter psikosomatis" bagi masyarakat.¹⁷

Sebagaimana telah disinggung, keunikan sekaligus sebagai magnet Ponpes adalah figur Kiai-ulama pemimpin Ponpes. Andai dalam lingkungan Ponpes tersebut terdapat beberapa Kiai-ulama, maka keberadaan mereka haruslah tetap mengikuti ritme Kiai-ulama *sepuh* di lingkungan Ponpes tersebut.

Dalam masalah ini, muncul faktor yang sangat penting sekaligus sebagai syarat dalam tradisi Islam, yaitu seorang Kiai-ulama adalah pemegang ilmu-ilmu agama doktrinal. Tugas ini tidak dapat



dilimpahkan kepada masyarakat umum karena berhubungan dengan kepercayaan bahwa ulama merupakan pewaris Nabi, seperti disebutkan dalam sebuah Hadis.¹⁸ Bila demikian, bagaimana keunikan kepemimpinan Kiai-ulama Ponpes ini dapat dipandang sebagai potensi Ponpes yang bernilai ekonomis?

Setidaknya ada tiga jawaban yang dapat diberikan:¹⁹ *Pertama*, dengan “menjual” figur Kiai-ulama karena kedalaman ilmunya. Artinya, figur seorang Kiai-ulama Ponpes merupakan magnet (daya tarik) yang luar biasa bagi calon santri, wali santri, dan masyarakat untuk berburu ilmu. Kedalaman ilmu sang Kiai-ulama inilah sesungguhnya awal potensi ekonomi itu terbangun.

Ini tidak berarti komersialisasi ilmu, tetapi sudah seharusnya orang-orang yang berilmu itu memperoleh penghargaan meski tidak selalu berupa materi. Meski potensi berasal dari figur seorang atau beberapa Kiai Ponpes, tetapi karena institusi Ponpes biasanya melekat dengan figur sang Kiai-ulama, maka pemanfaatan potensi tersebut juga untuk kemaslahatan Ponpes.

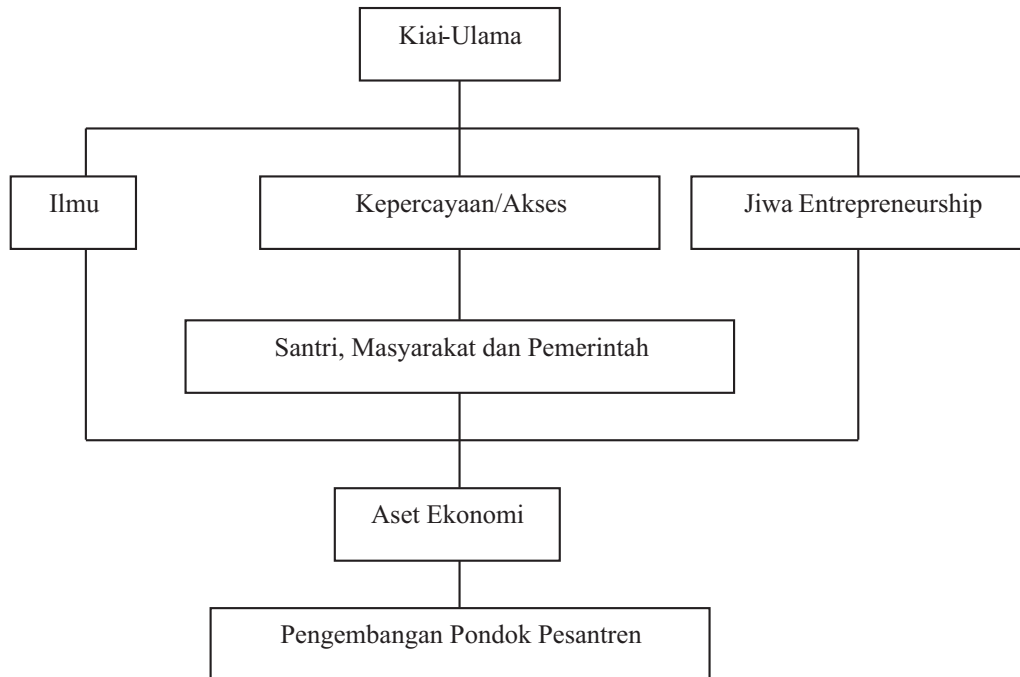
Kedua, pada umumnya, seorang Kiai-ulama adalah tokoh panutan masyarakat dan pemerintah. Ketokohan seorang Kiai-ulama ini memunculkan sebuah kepercayaan, dan dari kepercayaan melahirkan akses. Dari sinilah jalur-jalur komunikasi, baik dalam kerangka ekonomis, politis, maupun yang lainnya terbangun dengan sendirinya. Persoalannya bagaimana mengemas kepercayaan yang telah menjadi aset itu dengan moralitas agama? Dalam konteks inilah Kiai-ulama Ponpes diuji.

Ketiga, pada umumnya, seorang Kiai-ulama, sebelum membangun sebuah Ponpes, telah mandiri secara ekonomi, misalnya sebagai petani, pedagang, dan sebagainya. Pada beberapa Ponpes para santri bahkan belajar bertani dan berdagang kepada sang Kiai-ulama. Kiai-ulama semacam ini sering menjadi tumpuan keuangan Ponpes.

Ini berarti sejak awal Kiai-ulama telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dari aspek mental, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jiwa dan semangat *entrepreneurship* inilah yang mendasari kemandirian perekonomian Ponpes. Apabila aset dan jiwa *entrepreneurship* ini dipadukan, maka hasilnya dapat dijadikan dasar membangun tatanan ekonomi Ponpes. Ketiga potensi ekonomi Kiai-ulama ini apabila diskemakan, dapat tergambar sebagai berikut.



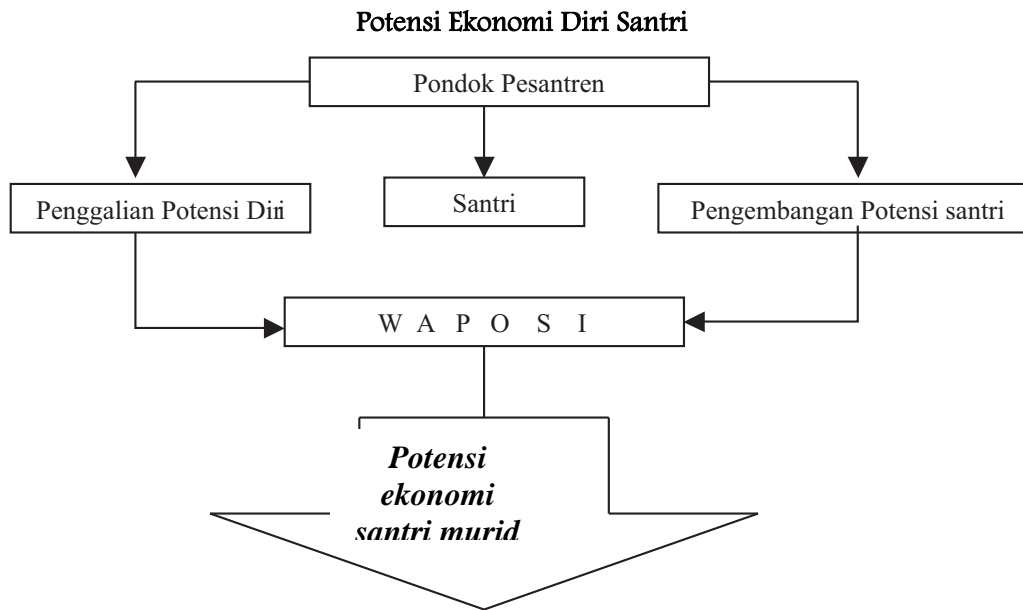
Potensi ekonomi Kiai-Ulama



Santri-Murid

Potensi ekonomi kedua yang melekat pada Ponpes adalah santri, atau murid atau siswa.²⁰ Analisis potensi diri ini harus dipahami, bahwa para santri tersebut sering mempunyai potensi/bakat bawaan, seperti kemampuan membaca al-Qur'an, kaligrafi, pertukangan, dan sebagainya. Bakat bawaan ini sudah seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan. Karena itulah, ada baiknya bila dalam Ponpes diterapkan penelusuran potensi/bakat dan minat santri, kemudian dibina dan dilatih.

Dengan demikian, dalam Ponpes tersebut perlu juga dikembangkan *Wadah Apresiasi Potensi Santri* (WAPOS), wadah semacam ini, mungkin sudah ada di beberapa Ponpes, tinggal bagaimana mengaturnya supaya produktif. Perlu juga ditambahkan, penggalan potensi diri santri-murid ini merambah pada potensi-potensi, semisal politisi, advokasi, jurnalistik, dan seterusnya. Karenanya, untuk ke depan wajah Ponpes menjadi semakin kaya ragam dan warna.²¹



Pendidikan

Seperti telah disinggung di atas, salah satu keunikan Ponpes terletak pada sistem pendidikannya yang integral. Artinya, model pendidikan khas Ponpes, seperti *sorogan*²² nonklasikal dipadukan dengan model pendidikan modern yang klasikal. Di samping itu, juga disiplin ilmu yang ditekuninya, tidak hanya ilmu agama, melainkan sekaligus pelajaran umum lainnya, seperti bahasa Inggris, matematika, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Untuk yang terakhir ini, biasanya dapat dijumpai pada Ponpes yang sekaligus mengelola lembaga pendidikan formal, baik dengan nama madrasah seperti MTs dan MA, maupun sekolah seperti SMP dan SMA. Pesantren-pesantren yang sudah menerapkan pendidikan seperti ini di antaranya Ponpes Gontor Ponorogo, Ponpes al-Falah Ciampea Bogor, Ponpes Darun Najah Jakarta, Ponpes al-Muthfawiyah Tapanuli Selatan, dan Ponpes lainnya.²³ Di sinilah letak keunikan pendidikan Ponpes.²⁴

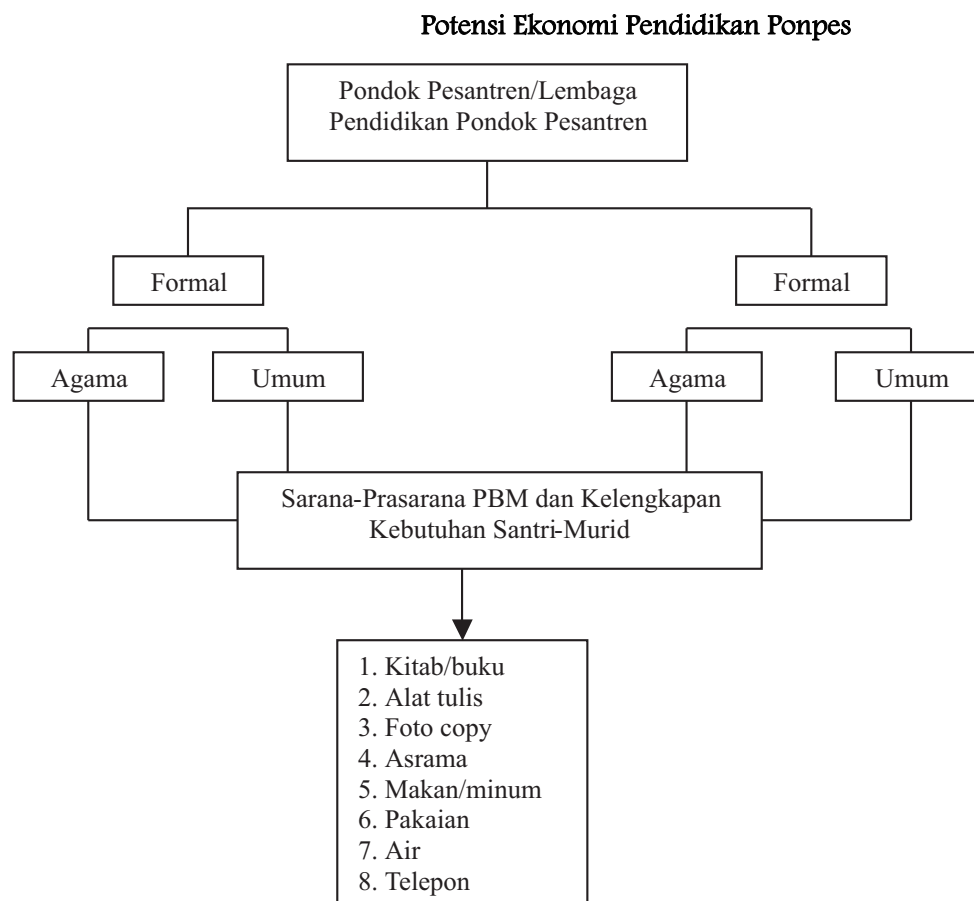
Bagaimana halnya dengan potensi ekonomi dari pendidikan pesantren ini? Sebagaimana lazimnya pendidikan, di dalamnya pasti ada murid-siswa, guru, sarana, dan prasarana. Dari sisi murid-siswa misalnya, sudah barang tentu dikenai kewajiban membayar *syahriah*.²⁵ Untuk kelancaran proses pembelajaran, diperlukan seperangkat buku, kitab, dan alat-alat tulis. Dari sini bisa dikembangkan salah satu unit usaha Ponpes yang menyediakan sarana belajar tersebut, semisal toko buku atau kitab, alat tulis, dan foto copy, belum lagi dari sisi kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, air, telepon, asrama, pakaian, dan sebagainya.

Potensi ekonomi dari sektor pendidikan ini tentu menjadi semakin sempurna bila digabung dengan potensi diri santri-murid seperti telah dijelaskan dalam poin dua. Persoalannya tinggal bagaimana semua potensi ini dikelola secara profesional, tetapi tetap menampilkan karakteristik pesantren. Inilah salah satu tantangan Ponpes dan lembaga pendidikan yang ada dalam Ponpes. Karena



itulah diperlukan keberanian manajerial dari para pengasuh untuk mewarnai manajemen Ponpes secara lebih profesional dan modern, tetapi khas pesantren. Dalam konteks ini, keharismatikan seorang Kiai-ulama, tidak hanya dilihat dari aspek agama, tetapi juga aspek yang lain, seperti wawasan dan manajerial Kiai-ulama.

Apabila ketiga pilar utama ini terpenuhi, Ponpes telah memenuhi tiga fungsi utamanya, yaitu *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).





Kesimpulan

Ponpes mempunyai tiga fungsi utama yang senantiasa diembannya, yaitu: *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*); *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*); *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Ponpes juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi. Di sisi lain ponpes yang didiami oleh santri yang jumlahnya cukup banyak merupakan konsumen yang positif dan didukung oleh masyarakat sekitarnya. Artinya, santri dan masyarakat sekeliling pada dasarnya adalah konsumen yang kebutuhannya dapat dicukupi secara ekonomi oleh pesantren itu sendiri. Jadi, pesantren hakikatnya bisa mandiri untuk menjadi pusat kelembagaan ekonomi, bagi warganya di dalam pesantren dan di luar pesantren.

Endnote

¹ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 771.

² Marzuki Wahid, *et al.*, *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 13.

³ A. Halim, "Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim *et al.*, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 222.

⁴ Rr. Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim *et al.*, *Manajemen Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 233.

⁵ *Ibid.*, hal. 234.

⁶ H. Nur Syam, "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren" dalam A. Halim *et al.*, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 248.

⁷ *Ibid.*, hal. 247.

⁸ *Ibid.*, hal. 252-253.

⁹ Rr. Suhartini, "Problem", hal. 235.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 235.

¹¹ Lihat Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2005), hal. 125-133.

¹² Rr. Suhartini, "Problem", hal. 237-240.

¹³ *Ibid.*, hal. 240-241.

¹⁴ Lihat Yusuf Qardhawi, *al Hill al Islami Faridhah Islamiyah* (Kairo: Bank al-Taqwa, TT), hal. 64.

¹⁵ QS. an-Nisa ayat 5.



¹⁶ QS. ad-Dhuha ayat 7.

¹⁷ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, hal. 771.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, "Prolog" dalam Marzuki Wahid, *et al.*, "*Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*" (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 15.

¹⁹ A. Halim, *Menggali*, hal. 224.

²⁰ Istilah "santri" biasanya dipakai untuk seseorang yang hanya belajar atau mengaji di Ponpes, sedangkan murid atau siswa biasanya dipakai untuk seseorang yang belajar di sekolah formal. Adapun yang belajar di sekolah yang belajar di sekolah formal milik pesantren, meski bisa disebut sebagai murid atau siswa, tetapi sebutan umum yang lazim dipakai adalah santri.

²¹ A. Halim, "Menggali", hal. 227.

²² Sistem *sorogan* adalah sistem pendidikan Islam tradisional secara individual. Umpama seorang murid mendatangi seorang guru yang akan membacakan beberapa baris al-Qur'an atau kitab-kitab yang berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Pada gilirannya, murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata persis seperti yang dilakukan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa sehingga para murid diharapkan mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam suatu kalimat bahasa Arab. Dengan demikian, para murid dapat belajar tata bahasa Arab langsung dari kitab-kitab tersebut. Murid diharuskan menguasai pembacaan dan terjemahan tersebut secara tepat dan hanya bisa menerima tambahan pelajaran yang baru bila telah berulang-ulang mendalami pelajaran sebelumnya. Para guru pengajian dalam taraf ini selalu menekankan kualitas dan tidak tertarik untuk mempunyai murid lebih dari 3 atau 4 orang. Jika dalam seluruh hidup guru tersebut ia berhasil menelorkan sekitar 10 murid yang dapat menyelesaikan pelajaran di pesantren, ia akan dianggap sebagai seorang guru yang berhasil. Lihat, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 28-33.

²³ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, hal. 771.

²⁴ A. Halim, "Menggali", hal. 229.

²⁵ *Syahriah* adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dari kata *syahr* yang berarti bulan. Di Ponpes *syahriah* berarti kewajiban membayar uang SPP bagi santri-murid setiap bulan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufiq. 1996. *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Azizi, Qodri. 2004. *Membangun Pondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Halim A., *et al.* 2005. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Maksum, H. 1999. *Madrasah, Sejarah dan Pengembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmi.
- Qardawi, Yusuf. TT. *Al Hill al Islami Faridhah Islamiah*. Kairo: Bank al-Taqwa.
- SM, Ismail, *et al.* 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang kerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.



- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wahid, Marzuki, *et al.* 2001. *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.
- Zaini, K.H. A. Wahid. 1995. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY.